ABSTRAKSI

Batas masa jabatan kepala daerah secara teoretis memutus akuntabilitas elektoral dan dapat mengubah perilaku penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis secara empiris perbedaan alokasi anggaran belanja antara petahana *lame-duck* dan petahana yang bukan *lame-duck* di Indonesia. Analisis menggunakan data *pooled cross-section* dari 735 observasi bupati atau wali kota pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 dengan metode *Pooled Ordinary Least Squares* yang memasukkan efek tetap provinsi dan tahun. Struktur anggaran belanja mencakup empat pos utama, yaitu belanja modal, belanja sosial, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa, di mana petahana *lame-duck* diukur menggunakan dumi kepala daerah definitif pada periode kedua masa jabatan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa petahana *lame-duck* berhubungan positif dengan total belanja daerah dan dengan porsi belanja sosial. Pada belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik.

Kata kunci: *Lame-duck*; Alokasi Belanja Daerah; Batas Masa Jabatan; Pilkada
JEL: D72; D73; H72; H76

SEMARANG
FEB UNDIP